

**UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM  
KAMPUNG *HOME* INDUSTRI DI KELURAHAN KARANGANYAR  
GUNUNG KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG**

Nestiar Novika Rahmawati, Nina Widowati, Maesaroh

**Program Studi Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (027) 7465407

Faksimile (024)7465402

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Upaya penanggulangan kemiskinan Kota Semarang dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Salah satu upaya inovatif yang dibuat Pemerintah Kota Semarang adalah kampung tematik. Permasalahan yang ditemukan yaitu kurangnya pemanfaatan prasarana pemasaran, fasilitator saling melempar tanggung jawab, arsipari kurang baik, partisipasi aktif dan rasa kepemilikan program masyarakat kurang, dukungan fasilitator kurang, paguyuban belum terintegrasi, kurang maksimalnya hasil pendapatan *home* industri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik penentuan informan adalah *snowball sampling*. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, tahap sosialisasi belum melibatkan proses sosialisasi yang memadai. Tahap proses pemberdayaan terdapat kendala dan upaya penyelesaian masalah yang belum dilakukan. Tahap pemandirian belum tercapai karena kesadaran memanfaatkan peluang belum dimiliki. Hasil dan keluaran masih belum mampu untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat sasaran sesuai keluaran Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik. Hambatan yang ditemukan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kemampuan manajerial, dan kurangnya kemampuan mengelola peluang pasar. Saran yang diberikan adalah perlu mengubah sikap birokrasi mengenai hakikat keberdayaan dan sifat hubungan terhadap masyarakat sasaran dengan mengganti cara pandang proyek dan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Tahapan Pemberdayaan, Kampung Tematik

## ABSTRACT

*Semarang City's efforts to overcome poverty are by issuing Semarang City Regional Regulation Number 12 of 2016 concerning Poverty Alleviation in Semarang City. One of the innovative efforts made by the Semarang City Government is the establishment of thematic villages. The problems found were lack of use of marketing infrastructure, facilitators shifting responsibilities to each other, poor archivists, lack of active participation and sense of ownership of community programs, lack of facilitator support, community groups not yet integrated, less than optimal income from home industry. This study uses a qualitative method. The technique for determining informants is snowball sampling. Data collection methods through interviews, observation and documentation. The research results show that the socialization stage does not involve an adequate socialization process. In the empowerment process stage, there are obstacles and efforts to resolve problems that have not been carried out. The stage of independence has not been reached because the awareness of taking advantage of opportunities has not been achieved. There are still results and outputs that are not capable of equalizing the welfare of the target community according to the output of Semarang Mayor Regulation Number 22 of 2018 concerning Guidelines for Implementing Thematic Villages. The obstacles found were lack of community participation, limited managerial ability, and lack of ability to manage market opportunities. The advice given is that it is necessary to change the bureaucracy's attitude regarding the nature of empowerment and the nature of its relationship with the target community by changing the perspective of the project and strengthening the potential of the community.*

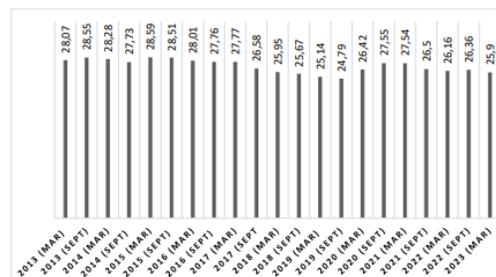
**Keywords:** *Community Empowerment, Stages of Empowerment, Thematic Village*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan negara salah satunya diukur dari berkurangnya angka penduduk miskin. *World Bank* menunjukkan bahwa penduduk Indonesia sekitar 60 persen masih hidup di bawah garis kemiskinan (Komisi IX DPR R1, 2022).

**Grafik 1.1** Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Periode 2013-2023 (Juta Jiwa)



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023

Berdasarkan grafik 1.1 diketahui pada Maret 2020 jumlah ini naik 1,63 juta jiwa terhadap September 2023. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang pada September 2022. Angka kemiskinan ini dapat melonjak selain karena adanya wabah *covid-19*, juga terjadi karena masyarakat masih belum berdaya.

**Tabel 1. 1 Angka Penduduk Miskin Kota Semarang 2013-2023**

Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)				
2019	2020	2021	2022	2023
71,97	79,58	84,45	79,87	80,53

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Semarang selalu meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 setelahnya menurun pada tahun 2022 dan melonjak kembali di tahun 2023. Angka permasalahan kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kota Semarang masih tinggi, yaitu 7 persen di atas provinsi (5-6%).

Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan negara untuk Kota Semarang, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang. Salah satu upaya inovatif yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang adalah pendirian kampung tematik. Sesuai dasar hukum pelaksanaan kampung tematik, yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik.

Kota Semarang sampai pada tahun 2023 telah menetapkan dan meresmikan 269 kampung tematik. Program kampung tematik ini mendapatkan dana sebesar Rp 200.000.000, untuk upaya fisik dan non-fisik guna menangani masalah wilayah serta mengembangkan potensi yang ada. Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, merupakan salah satu kampung tematik yang bertemakan *home* industri ramah lingkungan pertama yang ada di Kota Semarang. Produk yang dihasilkan oleh Kampung

*Home* Industri adalah produk usaha rumahan yang terdiri dari berbagai macam makanan dan kerajinan. Anggota tersebut terdiri dari 81 pelaku UMKM bidang pangan, sembako, serta IRT (industri rumah tangga) dan terdapat 15 pelaku UMKM bidang jasa, kraft, dan sandang.

Sangat disayangkan dari 96 UMKM tersebut baru sekitar lima pelaku usaha yang sudah memperbarui izin usaha NIB (Nomor Induk Berusaha) menjadi NIB-RBA (Nomor Induk Berusaha-*Risk Based Approach*), melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Alasan utamanya adalah karena kurangnya waktu luang untuk mengurusnya, serta persepsi bahwa prosedur administratifnya rumit.

Program pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri mengalami beberapa kendala yang mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Salah satu kendala pada aspek fisik adalah kurangnya pemanfaatan prasarana pemasaran, seperti galeri *home* industri.

Permasalahan berikutnya terletak pada aspek sosial, fasilitator

program didapati saling melempar tanggung jawab atas perannya dalam pelaksanaan program karena pihak kelurahan melimpahkan *jobdesk* kepada koordinator Kampung *Home* Industri dalam pelaksanaan program secara penuh sehingga sering terjadi *overlapping jobdesk*.

Para pemangku kepentingan seperti koordinator, RW, kelurahan dan kecamatan tidak ada yang memiliki salinan proposal Kampung *Home* Industri. Kelurahan juga mengilangkan surat yang diberikan oleh Koordinator Kampung *Home* Industri. Hal ini mengindikasikan arsipari yang kurang baik berupa pemeliharaan dan penyimpanan dokumen penting. Masih ada masyarakat yang rasa memiliki programnya kurang dan cenderung pasif sehingga ditemukan masalah lain kurangnya integrasi yang baik di antara paguyuban.

Permasalahan pada aspek ekonomi, yaitu kurang maksimalnya hasil pendapatan *home* industri karena terkendala pemasaran. Mayoritas masyarakat cenderung tidak bergerak karena ada di zona nyaman

menggunakan metode pemasaran tradisional dan belum memiliki cita-cita yang ingin lebih melebarkan sayap terhadap produknya.

Pemberdayaan masyarakat ditinjau dan dilakukan di dalam administrasi dengan pendekatan yang bertitik tolak dari teori pokok manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Kartasmita, 2000). Dalam administrasi publik pada perencanaan melibatkan penyusunan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, yaitu dari Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik

Berangkat dari hal tersebut, menjadikan peneliti tertarik untuk mengembangkan wawasan dari konteks tersebut dalam administrasi publik dengan pendekatan yang bertitik tolak dari teori pokok manajemen dengan fokus permasalahan melalui rumusan masalah bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan

pemberdayaan di Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi pada program Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari Kota Semarang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis bagaimana upaya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Kampung *Home* Industri, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

2. Menganalisis faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat pada program kampung *Home Industri*, Kelurahan Karanganyar Gunung Kecamatan Candisari, untuk mencapai tujuan.

#### **D. Kajian Pustaka**

##### **1. Administrasi Publik**

Chandler & Plano (dalam Keban, 2014:3) administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya dan aktor sektor publik diatur dan diselaraskan untuk mengembangkan, melaksanakan, dan mengelola keputusan yang terkait dengan kebijakan publik.

G. Shabbir Cheema (2007) (dalam Keban, 2014:37) *Governance*, Paradigma ini menekankan pada mekanisme dan proses di mana warga dan kelompok masyarakat dapat menyuarakan kepentingan mereka, remediasi perbedaan, dan memenuhi hak serta kewajiban mereka.

##### **2. Manajemen Publik**

Overman (dalam Keban, 2014:92) mengemukakan bahwa manajemen

publik adalah bidang studi lintas disiplin yang mempertimbangkan berbagai aspek umum organisasi, yang melibatkan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian.

##### **3. Pemberdayaan Masyarakat**

Rappaport (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017:27) pemberdayaan dianggap sebagai proses mekanisme di mana individu, organisasi, dan komunitas mendapatkan kendali atas nasib atau arah hidup mereka.

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat, Tim Delivery (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017:125-127) Tahap Seleksi Lokasi/Wilayah, Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat, dan Tahap Pemandirian Masyarakat.

##### **4. Keluaran Kampung Tematik Berbasis Pemberdayaan Masyarakat**

Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 memuat poin-poin terkait *outcome* pelaksanaan kampung tematik berbasis

pemberdayaan masyarakat, di antaranya:

- a) Terbentuknya kepribadian dan perilaku masyarakat yang peduli terhadap lingkungan;
- b) Tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui perputaran ekonomi berbasis potensi lokal yang diangkat;
- c) Terciptanya kualitas lingkungan permukiman yang lebih baik dan tertata dengan terwujudnya:
  - 1) Jalan lingkungan yang baik
  - 2) Saluran air yang baik, dan
  - 3) Sanitasi dan penghijauan yang baik.

## 5. Faktor Penghambat

Menurut Arsiyah (2009:374) menyatakan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat menghadapi beberapa hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal dalam pemberdayaan meliputi:

1. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.
2. Tidak tersedianya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.
3. Keterbatasan kemampuan dalam pengelolaan.

4. Kurangnya kemampuan dalam mengelola peluang pasar yang tersedia dan terbatasnya modal usaha.

Hambatan eksternal dalam pemberdayaan masyarakat di antaranya yaitu:

- 1) Kurang optimalnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat.
- 2) Kurangnya dukungan modal atau kerjasama dari sektor swasta.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Lokus penelitian yang dipilih adalah Kampung *Home* Industri yang berada pada RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Pengambilan informan dilakukan dengan teknik *snowball sample*. Penelitian ini memiliki informan kunci, yaitu Koordinator Kampung *Home* Industri. Informan lainnya, yaitu Sub Koordinator Perencanaan Sosial Bappeda Kota Semarang, Kasi Sosial Kelurahan Karanganyar Gunung, Ketua RW 05 Kelurahan Karanganyar Gunung,

Mantan Ketua RW 05 yang menjabat saat pembentukan Kampung *Home* Industri, Kasi Pembangunan Kecamatan Candisari dan masyarakat pelaku UMKM di RW 05. Jenis data penelitian ini data kualitatif yang terdiri dari transkrip wawancara, dokumentasi foto, dokumen pribadi serta dokumen resmi lainnya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam menganalisis dan interpretasi data menggunakan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data.

## **F. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung *Home* Industri**

#### **a. Tahap Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat**

Tahap ini merupakan proses sosialisasi pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan Tim Delivery (dalam Mardikanto & Soebianto, 2017:125) sebagai upaya dalam menciptakan komunikasi yang

efektif antara pemerintah desa, lembaga desa dalam pembangunan lokal. Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan di Kampung *Home* Industri mengalami tantangan signifikan dalam hal dukungan dan respons dari pemerintah daerah, terutama dari tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam konteks administrasi publik, hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan komunikasi efektif antara berbagai instansi pemerintah terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi, yang membantu tercapainya koordinasi (Tunggal, 2003:221). Belum ada tindakan nyata untuk merangkul pelaku UMKM di Kampung *Home* Industri dengan memberikan sosialisasi yang masif, mau bergerak untuk mempromosikan produk UMKM, dan membantu pemasaran yang lebih efektif serta masyarakat sasaran sendiri juga belum ada rasa kepemilikan program.

Hambatan yang ditemukan yaitu tidak adanya kepemilikan salinan

proposal oleh koordinator, ketua RW, kelurahan hingga kecamatan, hal ini menunjukkan arsipari yang kurang baik. Janji yang diberikan oleh mantan RW 05 periode 2019-2023 mengenai pengadaan motor penggerak sebagai agen penyampai informasi belum terealisasi hingga akhir masa jabatannya. Rasa jenuh masyarakat terhadap program pemberdayaan yang monoton dan kurang inovatif, salah satu penyebabnya karena ketidakcocokan dalam kepengurusan, dan perbedaan pandangan antar anggota tim atau pengurus. Koordinasi secara *bottom up* juga tidak terakomodasi dengan baik.

## **b. Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat**

### **1) Mengidentifikasi dan Mengkaji Potensi Wilayah, Permasalahan serta Peluangnya**

Pemetaan potensi dan wilayah di Kampung *Home* Industri dilakukan melalui kegiatan rembuk warga, dan hasilnya diangkat menjadi pemetaan potensi masalah yang kemudian dikomunikasikan ke kelurahan. Berdasarkan hasil pemetaan potensi

masalah, masyarakat ingin mengembangkan potensinya dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pengembangan potensi ini dilakukan dengan mengikuti lomba. Berikut merupakan pencapaian lomba oleh Kampung *Home* Industri :

**Tabel 3. 1 Pencapaian Kampung *Home* Industri**

Nama Kegiatan	Tahun Pelaksanaan	Ket
Lomba Rumah Sehat Kota Semarang	April 2016	Juara 3
Lomba Hatinya PKK Kota Semarang	Juli 2016	Juara Harapan 3
UMKM Kota Semarang	September 2016	Predikat Kampung Tematik ( <i>Home</i> Industri)
Lomba UMKM Kreatif Kota Semarang	2019-2020	Juara 2

Sumber : Profil Kampung *Home* Industri 2022

Berdasarkan tabel 3.2 tersebut, Kampung *Home* Industri telah menjuarai beberapa lomba. Hal ini dapat menunjang eksistensi kampung

untuk membuka peluang kerjasama dengan *stakeholder* karena dapat dipercaya. Kejuaraan yang terakhir diperoleh tahun 2019-2020 dari Lomba UMKM Kreatif Kota Semarang dengan predikat Juara 2.

Kampung *Home* Industri, dalam tahap proses pemberdayaan masyarakat ini dapat dikaji kembali mengenai potensi apa yang masih dapat dikembangkan atau muncul saat keberjalanan, dan permasalahan yang *exist* di wilayah tersebut (Tabel 3.3).

**Tabel 3. 2 Daftar Potensi dan Permasalahan Desa**

Potensi	Permasalahan
<b>Aspek Fisik</b>	
1) Adanya prasarana pemasaran	1) Kurangnya pemanfaatan prasarana pemasaran
<b>Aspek Sosial</b>	
1) Kelompok pelaku UMKM yang dapat dikembangkan keterampilannya	1) Fasilitator saling melempar tanggung jawab
2) Adanya swadaya masyarakat	2) Arsipari berupa pemeliharaan serta penyimpanan dokumen

Potensi	Permasalahan
3) Koordinator Kampung <i>Home</i> Industri yang kompeten	<p>penting kurang baik</p> <p>3) Partisipasi aktif masyarakat dalam program masih kurang</p> <p>4) Dukungan fasilitator dalam pelaksanaan program kampung tematik kurang</p> <p>5) Paguyuban yang ada belum terintegrasi dengan baik</p>
<b>Aspek Ekonomi</b>	
1) Adanya dukungan dana dari pemerintah untuk kegiatan fisik dan non fisik	1) Kurang maksimalnya hasil pendapatan <i>home</i> industri ini karena terkendala pemasaran

Sumber : Olahan Peneliti dan Data Bappeda Kota Semarang

Tabel 3.3 memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi potensi dan permasalahan di Kampung *Home* Industri. Permasalahan di Kampung

*Home* Industri dominan pada aspek sosial. Kampung *Home* Industri juga memiliki potensi prasarana pemasaran berupa galeri *home* industri yang merupakan kios yang dibangun untuk tempat *display* dan pemasaran produk UMKM dari Kampung *Home* Industri.

**Gambar 3. 1 Galeri *Home* Industri**



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2024

Pada aspek sosial di wilayah Kampung *Home* Industri ditemukan adanya potensi kelompok pelaku UMKM industri rumahan di RW 05 khususnya di RT 04, 07 dan 10. Dalam konteks ini, produk makanan, kriya dan jasa menjadi karakteristiknya. Masyarakat swadaya untuk membuat forum dan mandiri terkait modal usaha. Masyarakat saling mendukung dengan membeli dan mempromosikan produk sesama UMKM Kampung *Home*

Industri. Dalam keberjalanannya koordinator yang kompeten sangat dimaksimalkan perannya. Kampung *Home* Industri mendapatkan bantuan pendanaan sebesar 200 juta untuk pembangunan fisik dan non-fisik.

Permasalahan yang ada pada (Tabel 3.3) yaitu pemanfaatan galeri *home* industri belum dilakukan karena kurang efisien dan lokasi yang kurang strategis. Pada aspek sosial, fasilitator saling melempar tanggung jawab dengan melimpahkannya ke koordinator sehingga sering terjadi *overlapping jobdesk*. Dukungan pemangku wilayah juga minim dengan sering menunda pertemuan dan memberi perizinan. Kemudian arsipari yang buruk membuat kesulitan untuk melacak dan menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi. Partisipasi masyarakat juga kurang untuk mengikuti program seperti rembuk warga, sosialisasi, pendaftaran izin usaha dan paguyuban sehingga belum terintegrasi. Kendala pada aspek ekonomi, yaitu masyarakat yang tidak mau bergerak untuk mengambil peluang

kerjasama yang diberikan pemerintah,  
cenderung ada di zona nyaman.

**2) Hasil Identifikasi dan Penerapan  
Rencana Kegiatan Kelompok**

**Tabel 3. 3 Penerapan Tindakan Hasil Identifikasi Potensi dan Pemecahan  
Masalah**

Permasalahan	Potensi	Tindakan Pemecahan Masalah
Aspek Fisik		
Kurangnya pemanfaatan prasarana pemasaran	Adanya prasarana pemasaran	Belum ada
Aspek Sosial		
Fasilitator saling melempar tanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator Kampung <i>Home</i> Industri yang kompeten</li> <li>2) Adanya swadaya masyarakat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Koordinator menjadi inisiator dalam memimpin dan mengkoordinasi semua pihak dalam pelaksanaan program</li> <li>2) Pembentukan paguyuban Kampung <i>Home</i> Industri</li> </ol>
Arsipari berupa pemeliharaan serta penyimpanan dokumen penting kurang baik	Koordinator Kampung <i>Home</i> Industri yang kompeten	Koordinator dan kelurahan selain membuat salinan dokumen juga disimpan pada layanan penyimpanan data berbasis <i>cloud</i>
Partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan program masih kurang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelompok pelaku UMKM yang dapat dikembangkan keterampilannya</li> <li>2) Koordinator Kampung <i>Home</i> Industri yang kompeten</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan rajut di rumah aspirasi dari dewan.</li> <li>2) Koordinator terjun langsung dalam sosialisasi melalui rembuk warga atau rutinan di kelurahan</li> </ol>
Dukungan fasilitator dalam pelaksanaan program kampung tematik kurang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kelompok pelaku UMKM yang dapat dikembangkan keterampilannya</li> <li>2) Adanya swadaya masyarakat</li> <li>3) Koordinator Kampung <i>Home</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk grup diskusi <i>online</i> atau forum komunikasi untuk berbagi informasi dan mengkoordinasikan kegiatan secara <i>real-time</i>.</li> <li>2) Koordinator Kampung <i>Home</i> Industri terjun langsung untuk melakukan sosialisasi saat ada</li> </ol>

Permasalahan	Potensi	Tindakan Pemecahan Masalah
	Industri yang kompeten	pertemuan atau PKK di RW 05
Paguyuban yang ada belum terintegrasi dengan baik	1) Adanya swadaya masyarakat 2) Koordinator Kampung <i>Home</i> Industri yang kompeten	1) Koordinator tetap melakukan pendekatan kolaboratif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan paguyuban 2) Memanfaatkan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp untuk memfasilitasi komunikasi antar anggota paguyuban.
Aspek Ekonomi		
Kurang maksimalnya hasil pendapatan <i>home</i> industri ini karena terkendala pemasaran	1) Kelompok pelaku UMKM yang dapat dikembangkan keterampilannya 2) Koordinator Kampung <i>Home</i> Industri yang kompeten	1) Kerjasama dengan AIESEC untuk pelatihan pemasaran <i>online</i> melalui <i>marketplace</i> 2) Membeli dan mempromosikan produk sesama pelaku UMKM di Kampung <i>Home</i> Industri. 3) Mengikuti bazar di kelurahan atau kecamatan.

Sumber : Olahan Peneliti 2024

Pelaksanaan tindakan pemecahan masalah, tidak semulus seperti yang dibayangkan (Tabel 3.6). Terdapat beberapa tindakan pemecahan masalah yang belum bisa diimplementasikan karena tentunya memerlukan proses dan dukungan fasilitator dan kesadaran masyarakat yang nyata. Diketahui Kampung *Home* Industri hampir tiga tahun sangat kurang mendapatkan dukungan dari pemangku wilayah,

peran koordinator tentunya sangat maksimal di sini. Berkat peran aktif koordinator dan masyarakat, walaupun ada yang belum terealisasi namun banyak yang sudah seperti yang diharapkan.

### **3) Memantau Proses dan Hasil Kegiatan secara Partisipatif**

Selama keberjalanan Kampung *Home* Industri sejak 2016, sudah

banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam segi infrastruktur (Gambar 3.3).

**Gambar 3. 2 Hasil Perbaikan  
Infrastruktur di Kampung *Home*  
Industri**



Sumber : Dokumentasi Peneliti 2024

Jalan yang tadinya kurang layak, menjadi layak. Lingkungan yang tadinya kumuh, sekarang sudah bersih. Mural yang tadinya memudar, telah diperbaiki agar kampung lebih

menarik. Selokan yang berkarat, sudah diperbaiki juga ditutup menggunakan semen. Hal ini menandakan bahwa hasil kegiatan dipantau dan dirawat oleh masyarakat.

Terkait monitoring pelaksanaan program Kampung *Home* Industri, pemantauan jarang dilakukan oleh pemerintah desa atau dinas terkait. Berdasarkan penuturan dari Bappeda Kota Semarang tersebut Kampung *Home* Industri belum termasuk dalam kondisi yang ideal karena masih ada Keterlibatan pemangku wilayah (kelurahan, kecamatan) dengan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan minim dan Partisipasi aktif dari kelembagaan di Kampung *Home* Industri berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti belum maksimal.

**c. Tahap Pemandirian Masyarakat**  
**1) Kemandirian Kampung *Home*  
Industri**

Kelompok pelaku UMKM di Kampung *Home* Industri memiliki

kemandirian untuk mengajukan kebutuhan untuk menunjang keberjalanan program yang akan diajukan pada saat musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). Mayoritas aktivitas di Kampung *Home* Industri dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat, menandakan tingkat kemandirian yang cukup pada konteks ini.

Namun pada tahap pemandirian masyarakat ini walaupun dukungan yang sudah ada dari fasilitator belum memberikan dampak yang signifikan karena masyarakat yang ada di zona nyaman. Dalam pelaksanaan program secara keseluruhan, masyarakat harus selalu didorong agar mau mengikuti program. Kepengurusan dan paguyuban di Kampung Home Industri juga tidak berjalan dengan lancar, namun kegiatan UMKM tetap berlangsung.

## **2) Hasil dan Keluaran dari Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kampung *Home* Industri**

### **a) Terbentuknya Kepribadian dan Perilaku Masyarakat yang Peduli terhadap Lingkungan (Sosial)**

Melalui program kampung tematik masyarakat merasakan perubahan dalam kualitas lingkungan permukiman karena jalan yang dulunya tidak layak telah dipavingisasi, masyarakat juga lebih peka dalam kegiatan gotong royong terkait perawatan infrastruktur. Kepedulian akan potensi yang ada juga dikembangkan oleh masyarakat Kampung *Home* Industri dengan cara mengikuti lomba mewakili kelurahan di tingkat kota.

### **b) Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat melalui Perputaran Ekonomi Berbasis Potensi Lokal yang Diangkat**

Dalam mengembangkan penjualan produknya, masyarakat secara swadaya saling mendukung dengan membeli serta mempromosikan produk sesama pelaku UMKM. Meskipun ada beberapa pelaku UMKM yang merasakan kesejahteraan melalui perputaran ekonomi, namun mayoritas belum merasakan hal yang sama.

Ketika terdapat penawaran dari koordinator terkait kerja sama dengan perhotelan masyarakat tidak mau mengambil peluang tersebut untuk mengembangkan usahanya. Dapat atau tidaknya suatu usaha masyarakat berkembang untuk meningkatkan perekonomian atau pendapatannya tergantung dengan bagaimana mereka mau berusaha dan mengambil peluang yang ada.

**c) Terciptanya Kualitas Lingkungan Permukiman yang Lebih Baik dan Tertata**

Terciptanya kualitas permukiman yang lebih baik ini terbentuk dari pengalaman langsung dengan permasalahan lingkungan yang memiliki wilayah kumuh dan jalan yang tidak layak. Kesadaran ini membawa masyarakat mengajukan sebagai kampung tematik untuk meningkatkan kualitas lingkungan mereka. Berkaitan dengan sanitasi dan penghijauan, Koordinator mengungkapkan bahwa di Kampung *Home Industri* cukup baik. Penghijauan

dilakukan melalui media pot atau halaman rumah.

**2. Faktor Penghambat Pemberdayaan di Kampung *Home Industri***

**1) Kurangnya Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat terbatas dan cenderung pasif dalam kegiatan rembuk warga. Terdapat masyarakat yang tidak ingin mengikuti program sosialisasi seperti sosialisasi packaging, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan izin usaha. Kemudahan pengembangan pemasaran dari pemerintah telah ditawarkan oleh Koordinator Kampung *Home Industri* namun masyarakat tidak mau mendaftarkan usahanya dan tidak bergerak untuk mengambil kesempatan tersebut, masyarakat juga merasa bosan serta memiliki mindset tidak ingin mengikuti pendampingan pemasaran oleh AIESEC. Terkait izin usaha seperti NIB, Pirt, Halal atau HAKI beberapa masyarakat belum mendaftarkan

produknya dengan alasan sibuk dan harus dipaksa.

## **2) Keterbatasan Kemampuan Manajemen**

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan namun sosialisasi yang ada belum memadai. Kurangnya informasi yang cukup dan fokus sosialisasi yang belum spesifik untuk Kampung *Home* Industri serta adanya ketidakcocokan dalam kepengurusan pelaksanaan program juga menjadi kendala dalam manajemen program pemberdayaan masyarakat. Manajemen kearsipan berupa pemeliharaan serta penyimpanan dokumen penting kurang baik. Para pemangku kepentingan, yakni koordinator, ketua RW, kelurahan, hingga kecamatan tidak memiliki salinan proposal Kampung *Home* Industri.

## **3) Tidak Adanya Kemampuan Mengelola untuk Mengembangkan Peluang Pasar**

Mayoritas masyarakat cenderung tidak bergerak karena ada di zona nyaman menggunakan metode pemasaran tradisional dan belum

memiliki cita-cita yang ingin lebih melebarkan sayap terhadap produknya. Kampung *Home* Industri, masih menghadapi hambatan karena kurangnya keterampilan dalam pemasaran online, disebabkan kesulitan mengikuti perkembangan zaman dan tren yang ada. Ada juga pendampingan dari AIESEC, tetapi hanya 6 pelaku UMKM yang didampingi. Meski telah diberi pendampingan, terdapat pelaku UMKM tidak mau menerima saran dalam pemasarannya.

## **KESIMPULAN**

Pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri telah dilaksanakan sampai dengan tahap pemandirian sesuai pedoman dan regulasi yang ada, namun pelaksanaan pada setiap tahapannya masih terdapat permasalahan perlu ditangani, serta hasil dan keluaran pelaksanaannya masih ada yang belum seperti yang diharapkan sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018. Pemberdayaan masyarakat di Kampung *Home* Industri juga belum

mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sasaran, karena pelaksanaan program di lapangan fokus utamanya adalah perbaikan kualitas lingkungan permukiman. Faktor penghambat yang ditemukan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kemampuan manajerial, dan kurangnya kemampuan dalam mengelola peluang pasar.

## **SARAN**

1. Perlu mengubah sikap birokrasi mengenai hakikat keberdayaan dan sifat hubungannya dengan masyarakat sasaran dengan mengganti cara pandang pendekatan proyek menjadi pemikiran yang berlandaskan bagaimana upaya memberi peluang dan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat.
2. Upaya pelaksanaan program kampung tematik harus lebih diprioritaskan pada pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan padat karya secara bergulir sehingga outcome Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018

dapat terwujud tidak hanya bersifat pembangunan sarana prasarana secara fisik saja tetapi lebih pada upaya meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

3. Diperlukan pengembangan kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat pelaku UMKM di Kampung *Home* Industri dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan, keahlian dan keterampilan teknis serta peningkatan penerapan manajemen modern melalui kebersamaan dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan pihak yang kompeten. Kelurahan dapat memperbaiki sistem kearsipan dengan memanfaatkan penyimpanan berbasis *cloud* yang mudah diakses dan memiliki klasifikasi yang jelas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsiyah, A. (2009). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Wacana*, 12(2).
- Kartasasmita, G. (2000). *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi*.

- Keban, Y. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, Teori dan Isu)* (3rd ed.). Penerbit Gava Media.
- Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (4th ed.). Alfabeta.
- Tunggal, A. (2003). *Manajemen Suatu Pengantar*. Rineka Cipta.
- (n.d.). <https://keccandisari.semarangkota.go.id/>

#### **Peraturan-Peraturan :**

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018

#### **Sumber berita dan lain-lain :**

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (n.d.). <https://semarangkota.bps.go.id/indikator/23/105/1/jumlah-pendudukmiskin.html>

Badan Pusat Statistik. (n.d.). <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119>

BPS provinsi Jawa Tengah. (n.d.). <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>

Dinas Penataan Ruang Kota Semarang. (n.d.). <https://distaru.semarangkota.go.id/semarang/>

Kecamatan Candisari. Kondisi Wilayah.